KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : KEM PPKF Disetujui DPR Sampaikan Catatan
Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

KEM PPKF Disetujui DPR Sampaikan Catatan

Asumsi-asumsi yang telah disusun pemerintah harus disertai upaya dan kebijakan yang tepat.

M Ilham Ramadhan Avisena
ilham@mediaindonesia.com

SEMBILAN fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usul Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-24 DPR masa sidang V tahun persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, kemarin.

Parlemen juga telah mengagendakan rapat paripurna yang beragendakan pemberian pandangan pemerintah atas tanggapan yang diberikan fraksi. "Pandangan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi telah dijadwalkan Badan Musyawarah DPR untuk disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa, 30 Mei 2023," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus selaku pemimpin rapat.

Kendati menyetujui usul KEM PPKF pemerintah, sembilan fraksi turut memberikan catatan kepada pengambil kebijakan guna menjadi pertimbangan di dalam pembahasan.

Fraksi PDIP, misalnya, meminta agar asumsi-asumsi yang telah disusun pemerintah disertai upaya dan kebijakan yang tepat. Juru bicara Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan peningkatan produktivitas sektoral.

Selain itu, kebijakan fiskal yang bakal dijalankan pada tahun depan didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang.

"Strategi jangka pendek perlu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. (Strategi) jangka panjang adalah mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia," jelas Masinton.

Utang pemerintah

Terkait dengan utang pemerintah, periset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan utang yang terakumulasi saat ini belum tentu sepenuhnya akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Itu bergantung pada kecakapan dan keandalan pengelolaan fiskal dan utang tersebut.

"Ini akan banyak dipengaruhi beberapa faktor, termasuk di dalamnya kelanjutan dari reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dan bagaimana kemudian struktur perekonomian Indonesia dalam jangka menengah sampai panjang," ujarnya.

Dia menambahkan, ketika Indonesia bisa mendorong struktur perekonomian dengan komposisi usaha formal lebih banyak daripada informal, upaya atau prospek penerimaan pajak akan menjadi jauh lebih baik. Itu merupakan salah satu cara yang menurutnya mampu mengurangi ketergantungan, rasio, hingga beban bunga utang secara bertahap.

Dari data Kementerian Keuangan, utang Indonesia mencapai Rp7.879,07 triliun hingga Maret 2023. Dengan nilai itu, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 39,17%. Angka itu masih tergolong aman lantaran jauh dari batas atas yang diatur dalam undang-undang. (E-3)